



**PENGARUH PENGGUNAAN *E-VILLAGE BUDGETING* TERHADAP
KINERJA APARATUR DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN
PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

***THE INFLUENCE OF USING E-VILLAGE BUDGETING ON THE
PERFORMANCE OF VILLAGE OFFICERS IN DISTRICT OF BANYUWANGI
BY INTERNAL CONTROL AS MODERATING VARIABLE***

SKRIPSI

oleh :

Dwi Ayu Septiyani

NIM : 130810301113

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PENGARUH PENGGUNAAN *E-VILLAGE BUDGETING* TERHADAP
KINERJA APARATUR DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN
PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

***THE INFLUENCE OF USING E-VILLAGE BUDGETING ON THE
PERFORMANCE OF VILLAGE OFFICERS IN DISTRICT OF BANYUWANGI
BY INTERNAL CONTROL AS MODERATING VARIABLE***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh :

Dwi Ayu Septiyani

NIM : 130810301113

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Sudarmiyati dan Ayah Anwar yang telah mendoakan, membimbing, serta memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada terhingga hingga sampai saat ini;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember Program Studi Akuntansi.

MOTTO

ألم يبلّغ الله يا فأن جم يعا منهما ي ص يب ح تي ،لذنه ياه ولاخرته ه ،لاخرته ه الله ياه ترك من ب خيركم ل يس
الآخرة
عساكر ابن الناس على كدالاته كوندوا ،

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu menyampaikan akhirat.

Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama manusia.”

(H.R Muslim)

“Entah berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena mereka akan menjadi seorang ibu.

Ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas.”

(Dian Sastrowardoyo)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ayu Septiyani

NIM : 130810301113

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Penggunaan *E-Village Budgeting* terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Februari 2017

Yang Menyatakan,

Dwi Ayu Septiyani

NIM. 130810301113

SKRIPSI

**PENGARUH PENGGUNAAN *E-VILLAGE BUDGETING* TERHADAP
KINERJA APARATUR DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN
PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

***THE INFLUENCE OF USING E-VILLAGE BUDGETING ON THE
PERFORMANCE OF VILLAGE OFFICERS IN DISTRICT OF BANYUWANGI
BY INTERNAL CONTROL AS MODERATING VARIABLE***

oleh :

Dwi Ayu Septiyani

NIM : 130810301113

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Penggunaan *E-Village Budgeting* terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi

Nama Mahasiswa : Dwi Ayu Septiyani

N I M : 130810301113

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan: 06 Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II,

Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak.

Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19710217 200003 1 001

NIP. 19720416 200112 1 001

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com., Ak.

NIP. 19640809 199003 2 001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH PENGGUNAAN *E-VILLAGE BUDGETING* TERHADAP
KINERJA APARATUR DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN
PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dwi Ayu Septiyani

NIM : 130810301113

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitian penguji pada tanggal:

27 Februari 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak. (.....)
NIP. 19550227 198403 1 001

Sekretaris : Nining Ika Wahyuni, S.E., M.Sc., Ak. (.....)
NIP. 19830624 200604 2 001

Anggota : Kartika, S.E., M.Sc., Ak. (.....)
NIP. 19820207 200812 2 002

Mengetahui/Menyetujui
Univrsitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

FOTO

4 x 6

Dr. Muhammad Miqdad., S.E., M.M., Ak., C.A.
NIP. 19710727 199512 1 001

Dwi Ayu Septiyani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi dengan pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuisisioner yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis yang terdiri dari metode analisis regresi sederhana dan metode *moderated regression analysis* (MRA), uji F, koefisien determinasi, serta uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-Village Budgeting* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi. Pengendalian internal mampu memoderasi hubungan antara penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: *e-Village Budgeting*, Kinerja dan Pengendalian Internal.

Dwi Ayu Septiyani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of using e-Village Budgeting on the performance of village officers in District of Banyuwangi by internal control as moderating variable. This study uses primary data collected from respondent's answers on questionnaires used in the study. Methods of data analysis using descriptive statistics, quality test data, test classical assumptions and hypothesis testing comprising analysis simple regression method and moderated regression analysis method (MRA), F test, coefficient of determination test, as well as t test. The results showed that the use of e-Village Budgeting has positive effect on performance of village officers in District of Banyuwangi is able to moderate the relationship between the use of e-Village on the Performance Budgeting village officers in Banyuwangi.

Keywords: e-Village Budgeting Influence, Performance and Internal Control.

RINGKASAN

Pengaruh Penggunaan *e-Village Budgeting* Terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi; Dwi Ayu Septiyani, 130810301113; 2017; 57 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan anggaran merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan anggaran diperlukan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Mulyadi (2001:488), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi dengan pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis yang terdiri dari metode analisis regresi linier sederhana, uji *moderated regression analysis* (MRA), uji F, uji koefisien determinasi, serta uji t.

Hasil menunjukkan Penggunaan *e-Village Budgeting* yang baik mampu meningkatkan kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi. Kedua menunjukkan bahwa pengendalian internal dalam penggunaan *E-Village Budgeting* sudah baik sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi.

PRAKATA

Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Ketua Jurusan Akuntansi yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com, Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Taufik Kurrohman, S.E., M.S.A., Ak., C.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Semua staf pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
6. Kedua orang tuaku, Ibu Sudarmiyati dan Ayah Anwar yang senantiasa membimbing, mendoakan dan mengayomi dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untuk penulis;

7. Mas Randi Azmi, terimakasih atas segala kesabarannya memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis;
8. Kakak-kakakku Mas Bagus, Mbak Cici dan adikku Karina serta Nenekku tercinta, terimakasih atas dukungan serta doa dalam penulisan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabatku beserta teman-teman seperjuangan Akuntansi 2013 terimakasih atas kebersamaan, semangat dan kerjasamanya selama ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 27 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	8
2.1.2 Teori Keagenan.....	9

2.2	<i>Good Corporate Governance</i>	10
2.2.1	Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	10
2.2.2	Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	11
2.3	Anggaran	12
2.3.1	Pengertian Anggaran	12
2.3.2	Fungsi Anggaran.....	13
2.4	Pengertian <i>E-Budgeting</i>	15
2.5	Pengertian <i>E-Village Budgeting</i>	15
2.6	Pengendalian Internal	17
2.6.1	Pengertian Pengendalian Internal	17
2.6.2	Unsur-unsur dari Pengendalian Internal	17
2.7	Kinerja Apratur Desa	19
2.7.1	Konsep Desa dan Aparat Desa	19
2.7.2	Pengukuran Kinerja Pemerintah.....	20
2.7.3	Tujuan Pengukuran Kinerja	21
2.7.4	Indikator Kinerja	21
2.8	Penelitian Terdahulu	22
2.9	Hipotesis Penelitian	23
2.9.1	Pengaruh Penggunaan <i>e-Village Budgeting</i> terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi.....	23
2.9.2	Pengaruh Penggunaan <i>e-Village Budgeting</i> terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi.....	25
2.10	Kerangka Penelitian	26
BAB 3	27
3.1	Rancangan Penelitian.....	27
3.2	Tempat dan Waktu.....	27
3.3	Populasi dan Sampel	28
3.4	Jenis dan Sumber Data	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data	29
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	29
3.6.1	Variabel Penelitian	29

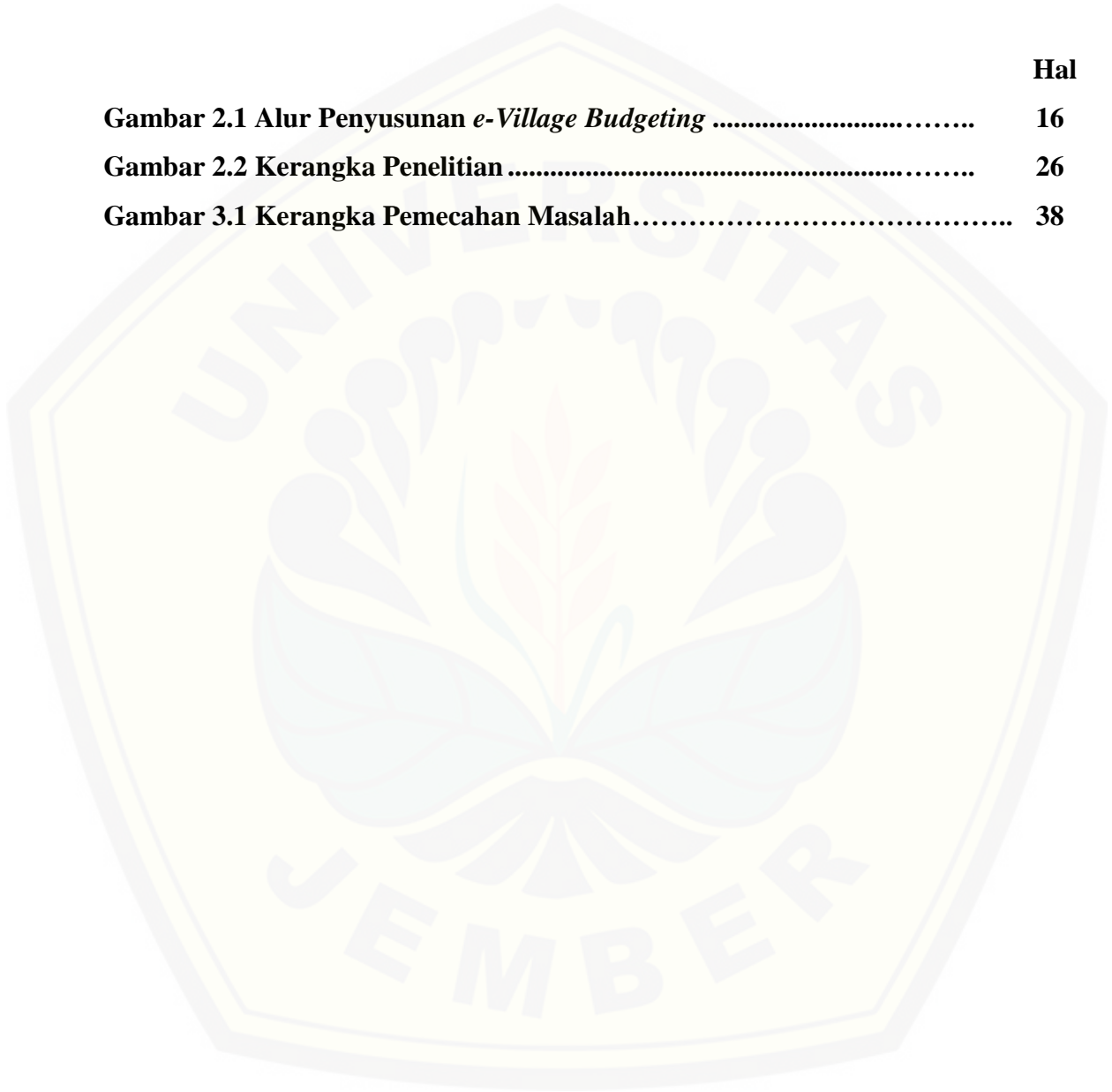
3.6.2 Definisi Operasional Variabel	30
3.7 Analisis Data	32
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	32
3.7.2 Uji Instrumen.....	33
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	34
3.7.4 Pengujian Hipotesis	35
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	38
BAB 4	39
4.1 Gambaran Umum.....	39
4.1.1 Deskripsi Karakteristik Responden.....	40
4.1.2 Statistik Deskriptif Jawaban Responden	41
4.2 Uji Instrumen	45
4.2.1 Uji Validitas.....	45
4.2.2 Uji Reliabilitas.....	45
4.3 Uji Asumsi Klasik	46
4.3.1 Uji Normalitas.....	46
4.3.2 Uji Multikolinearitas	47
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	48
4.4 Pengujian Hipotesis	48
4.4.1 Analisis Regresi Sederhana.....	48
4.4.2 <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	50
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.5.1 Hubungan Penggunaan <i>e-Village Budgeting</i> dengan Kinerja Aparatur Desa.....	52
4.5.2 Hubungan Pengendalian Internal terhadap Hubungan Penggunaan <i>e-Village Budgeting</i> dengan Kinerja Aparatur Desa....	54
BAB 5	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Keterbatasan	56
5.3 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	40
Tabel 4.2 Strata Pendidikan Responden.....	40
Tabel 4.3 Lama Bekerja	41
Tabel 4.4 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden.....	42
Tabel 4.5 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden untuk Variabel Penggunaan <i>e-Village Budgeting</i>	42
Tabel 4.6 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden untuk Variabel Kinerja Aparatur Desa	43
Tabel 4.7 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden untuk Variabel Pengendalian Internal	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Reabilitas.....	46
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	47
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser	48
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Sederhana	49
Tabel 4.13 Hasil <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	50

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Alur Penyusunan <i>e-Village Budgeting</i>	16
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	26
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Kuesioner Penelitian**
- 2. Rekapitulasi Kuesioner**
- 3. Karakteristik Responden**
- 4. Jawaban Responden**
- 5. Uji Instrumen**
- 6. Uji Asumsi Klasik**
- 7. Uji Hipotesis – Analisis Regresi Sederhana**
- 8. Uji Hipotesis – *Moderated Regression Analysis* (MRA)**
- 9. R tabel**
- 10. t tabel**
- 11. F tabel**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan adanya hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, untuk itu dibutuhkan perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, terutama pada manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan ini merupakan serangkaian wewenang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sampai pengawasan keuangan daerah. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sagay, 2013:2).

Penyusunan anggaran merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan anggaran diperlukan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Mulyadi (2001:488), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam

satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Anggaran memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintah. Anggaran sebagai alat kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya pemerintah mewujudkan kemakmuran masyarakat. Menurut Halim dan Kusufi (2012:75), sistem penganggaran pada pemerintah Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja. Pergeseran ini disebabkan perlunya akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Sistem anggaran kinerja tidak hanya menekankan pada *input* anggaran seperti pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga pada *output* dan *outcome*. Hal ini mengisyaratkan bahwa penganggaran kinerja memiliki tolok ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Nordawan, 2010:26).

Sunarsip (2001) mengemukakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. *Good governance* adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal penggunaan wewenang, administrasi, ekonomi dan politik untuk mengelola masalah negara dalam semua tingkatan berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, dan tanggap terhadap kebutuhan ataupun masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam sebuah kerangka hukum yang jelas. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 yang memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Zeyn, 2011:1).

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintah adalah dengan menerapkan *electronic government* dalam tata kelola pemerintah. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Melalui pengembangan *e-government*, dilakukan penataan sistem manajemen serta proses kerja dilingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Mirchandani (2008) dalam Rosalina (2016), sistem *electronic budgeting* merupakan hasil dari upaya pengembangan *e-government*. *E-budgeting* merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Sistem *e-budgeting* memberikan peranan yang penting dalam pembuatan anggaran. Sistem *e-budgeting* kini pun telah membuktikan sejumlah keunggulannya dibandingkan dengan penerapan penyusunan anggaran secara manual, beberapa keuntungan dari sistem *e-budgeting* antara lain yaitu mencegah tindakan korupsi, prinsip transparansi publik serta efisiensi pendataan keuangan. Sistem ini dapat mencegah korupsi karena praktik korupsi di sejumlah daerah dapat disamarkan dengan memanipulasi data keuangan, penerapan *e-budgeting* dapat mencegah adanya manipulasi tersebut karena data yang diinput telah tersebar ke publik sehingga tidak dapat di manipulasi. Sistem pendataan keuangan pun dapat berlangsung secara efisien dan efektif, hal ini dikarenakan pemerintah daerah dapat mengawasi dan mengevaluasi secara langsung.

Pelaksanaan kegiatan atau program penganggaran memerlukan pengawasan pada instansi untuk memantau proses penganggaran dan kesesuaiannya dengan

peraturan yang berlaku. Pengawasan tersebut berupa pengendalian internal untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi (Mulyadi:2001). Efisiensi dan efektivitas tersebut akan mendorong peningkatan pada kinerja organisasi.

Penelitian Rosalina (2016) mengungkapkan beberapa penelitian pentingnya instansi untuk menerapkan teknologi. Beberapa penelitian tersebut mempunyai hasil yang bervariasi. Farhangi (2013) menyebutkan bahwa keunggulan kompetitif dari teknologi memberikan pengaruh positif pada kinerja dari sektor swasta (perusahaan). Sedangkan dalam sektor publik sendiri, Kobelsky et al. (2014) menjelaskan bahwa penggunaan informasi teknologi memberikan pengaruh pada pencapaian positif yang diterima oleh sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Dalam sektor pemerintah, penerapan teknologi seperti pada *e-government* juga memberikan dampak yang positif pada peningkatan kinerja instansi (Baker:2008). Tetapi tidak sepenuhnya penerapan teknologi akan berjalan dengan sukses, Wu Jie (2015) menyebutkan bahwa tidak semua provinsi di Cina mengalami efisiensi setelah menerapkan website *e-government*. Beberapa provinsi masih belum dapat menerapkan teknologi tersebut secara maksimal. Hal tersebut mengindikasikan hasil yang beragam dari adanya penerapan teknologi dalam pemerintahan.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan pelopor dalam penggunaan sistem *e-budgeting* yang diterapkan sejak tahun 2012 (buku profil pemerintahan kota surabaya). Selain Kota Surabaya, beberapa daerah lain di Jawa Timur tercatat telah menerapkan *e-budgeting*, seperti Kota Malang, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Banyuwangi.

Strategi penganggaran berbasis online dilakukan seiring rencana kucuran APBN ke desa di mana setiap desa mendapatkan lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem

electronic-Village Budgeting (eVB) Banyuwangi merupakan salah satu contoh inovasi menuju transparansi penganggaran dan *monitoring* pembangunan di pelosok desa. Sistem ini juga menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten sehingga tercipta keselarasan. Terdapat tiga bagian dalam eVB di Kabupaten Banyuwangi yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Kabupaten Banyuwangi menjadi pelopor dalam pembuatan *software* aplikasi keuangan desa yang dibangun oleh kabupaten. Namun, hasil dari penggunaan sistem ini masih belum dapat menggambarkan sebagai sebuah transparansi yang demokratis.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosalina (2016), diperoleh hasil bahwa implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. Hal ini disebabkan implementasi *e-budgeting* akan meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, meningkatkan efektivitas penyusunan anggaran, memperpendek rantai birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan kinerja instansi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis juga ingin meneliti apakah penerapan eVB di Kabupaten Banyuwangi memberikan hasil yang sama.

Kabupaten Banyuwangi menduduki peringkat ke-11 dari daftar 50 kabupaten/kota terkaya di Indonesia. Dengan kata lain Kabupaten Banyuwangi menduduki posisi kedua terkaya di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya yang berada di posisi pertama. Definisi kabupaten dan kota terkaya versi Warta Ekonomi tersebut adalah daerah yang memiliki pendapatan daerah yang tinggi dengan didukung oleh daya tarik investasi yang tinggi, infrastruktur daerah yang lengkap, serta kualitas masyarakatnya. Pemeringkatan itu dilakukan dengan basis data kompilasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan dari tahun 2008-2011 (<http://www.banyuwangikab.go.id> diakses pada tanggal 19 Februari 2017).

Secara khusus Banyuwangi telah menerapkan penganggaran secara online melalui *electronic-Village Budgeting* (eVB) untuk mengontrol penggunaan anggaran dalam membangun dan mengembangkan desa yang ada di Banyuwangi. Sebanyak

189 desa atau seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan eVB dimulai pada tahun 2015. *Electronic-Village Budgeting* merupakan sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan (daring) alias online. Sistem ini dibuat agar penganggaran dan *monitoring* pembangunan di pelosok desa lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu juga untuk melindungi perangkat desa agar pelaksanaan pemanfaatan anggaran sesuai aturan (www.banyuwangikab.go.id diakses pada tanggal 10 September 2016).

Kabupaten Banyuwangi menjadi pelopor dalam pembuatan *software* aplikasi keuangan desa yang dibangun oleh kabupaten. Inovasi keuangan desa di Banyuwangi dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah contoh praktik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Payung-payung hukum Kabupaten Banyuwangi untuk implementasi Undang-Undang Desa sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lainnya di Indonesia untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Penggunaan *e-Village budgeting* juga sebagai sikap preventif dari penyelewengan Dana Desa dengan maksud untuk memberikan pemberdayaan kepada aparatur desa. Untuk itu, diperlukan adanya penelitian lebih dalam mengenai pengaruh penggunaan inovasi keuangan desa (*e-Village Budgeting*) terhadap peningkatan kinerja aparatur desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rosalina (2016). Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni terdapat pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Surabaya sebagai objek sedangkan penelitian ini menggunakan seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan *e-Village Budgeting* berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah pengendalian internal memoderasi penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memperoleh bukti empiris penggunaan *e-Village Budgeting* berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi.
2. Menemukan bukti bahwa pengendalian internal sebagai pemoderasi dari penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Memperluas kajian pada khasanah ilmu Akuntansi, khususnya bidang penerapan teknologi seperti *e-Village Budgeting* pada sektor pemerintahan.
2. Sebagai referensi peneliti di masa yang akan datang, khususnya penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah penelitian ini.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan rujukan bagi *decision makers* dalam mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan masalah *e-Village Budgeting*.
2. Memberikan informasi mengenai pengaruh *e-Village Budgeting* terhadap kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi dengan pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Stewardship Theory yang dikembangkan oleh Donaldson and Davis (1991) adalah paradigma baru untuk memahami adanya hubungan antara pemilik dan manajemen dari organisasi. Dalam pengelolaan *Stewardship Theory* organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama (Rosalina, 2016). Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer (manajemen) termotivasi pada tujuan dari hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dengan mengesampingkan tujuan-tujuan individu.

Dalam teori ini manajemen sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. Selain itu, perilaku *steward* cenderung loyal pada organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dalam sektor pemerintah *steward* sebagai manajemen dapat diartikan Pemerintah Daerah dan *principal* diartikan sebagai masyarakat. Teori ini beranggapan kepentingan masyarakat dapat dimaksimalkan dengan membagi wewenang, hak dan kewajiban kepada manajemen/*steward* (Sari, 2010). Dengan demikian, *steward* (manajemen) yang di beri kepercayaan oleh *principal* (rakyat) akan semakin termotivasi untuk bertindak sesuai tujuan organisasi (pemerintah daerah) dibanding kepentingan sendiri. Penggunaan teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu pemerintah dalam rangka mencapai tujuan organisasi, salah satunya dapat menggunakan alat berupa *e-budgeting* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran sehingga mampu untuk mendorong peningkatan kinerja.

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan *principal*. *Steward* melindungi dan

memaksimalkan kepuasan *principal* melalui kinerja yang dicapai. *Steward* yang berhasil meningkatkan kinerja akan mampu memuaskan organisasi karena sebagian besar rakyat memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja instansi, disamping dapat memberikan kepuasan kepada rakyat.

2.1.2 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya hubungan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa hubungan agensi dapat tercipta karena adanya kontrak antara *principal* (pemegang saham dan penyedia hutang) dengan *agent* (manajer) untuk melakukan pelayanan kepada pemilik perusahaan (Godfrey, 2010:362). Di dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran, muncul dua perspektif yang mengindikasikan aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Dalam hubungannya dengan rakyat, pihak aparat desa adalah *agent* yang membela kepentingan rakyat (Halim dan Kusufi, 2006).

Konteks Teori agensi biasanya dianggap sebagai pihak yang memaksimalkan dirinya tetapi ia tetap selalu berusaha memenuhi kontrak. Kontrak dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan dan para pihak mendapatkan hasil (*outcome*) yang paling optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang dapat dilakukan agen. Pelaporan keuangan, hubungan antara investor dan manajemen dapat dikarakterisasi sebagai hubungan keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dengan demikian, perilaku manajemen dapat dijelaskan dengan teori keagenan (Suwardjono, 2010:485).

2.2 *Good Corporate Governance*

2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Sedarmayanti (2012) mengatakan bahwa istilah “*corporate governance*” pertama diperkenalkan *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporan yang dikenal *Cadbury Report*. Laporan ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai/kekayaan para pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Sutedi (2011) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Secara singkat ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan *Corporate Governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksud untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikansi dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Sedarmayanti, 2012).

2.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Sedarmayanti (2012) mengatakan bahwa dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *Corporate Governance*, maka *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah mengembangkan prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi masing-masing negara. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut:

a. *Fairness* (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

b. *Disclosure dan Transparency* (Transparansi)

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban masing-masing kepada perusahaan dan pemegang saham.

d. *Responsibility* (responsibilitas)

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *Corporate Governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktik terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan (Sedarmayanti, 2012).

2.3 Anggaran

2.3.1 Pengertian Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009:61): "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran." Menurut Nordiawan (2010:48): "Anggaran dapat juga dinyatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial." Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sekedar rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya."

Istilah anggaran atau penganggaran (*budgeting*) sudah tidak asing lagi bagi mereka yang biasa berkecimpung dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Sebagai bagian dari fungsi perencanaan, sebagian besar organisasi modern sudah terbiasa melakukan perencanaan, termasuk perencanaan keuangan (anggaran). Saat ini, organisasi pemerintahan memberikan perhatian yang semakin besar dalam bidang penganggaran. Selain itu, minat publik semakin meningkat pula pada proses pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah daerah semenjak berlangsungnya era otonomi daerah.

Penganggaran di Indonesia juga dijelaskan melalui Undang-Undang, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan penganggaran merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

disetujui oleh lembaga legislatif dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan demikian menunjukkan bahwa penganggaran pemerintah daerah merupakan perencanaan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengalokasikan dana yang terbatas sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah untuk berbagai kegiatan pada periode tertentu.

2.3.2 Fungsi Anggaran

Nordiawan (2008:20) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Selain itu, dengan adanya penganggaran dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan atau penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

e. Anggaran sebagai alat koordinsai dan komunikasi

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Hal ini tampak dalam kegiatan penganggaran yang memerlukan koordinasi antar unit yang terkait. Selain itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

g. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Menurut Mardiasmo (2009) penganggaran dalam sektor pemerintah merupakan hal yang penting karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas sedangkan sumber daya untuk memenuhi hal tersebut sangat terbatas, sehingga diperlukan skala prioritas dan pilihan dalam mengalokasikan sumber daya.
3. Anggaran diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Dalam hal ini, dengan adanya anggaran akan terlihat jelas arah dari pengelolaan keuangan.

2.4 Pengertian *E-Budgeting*

Menurut Camaratta (2002) dalam Rosalina (2016), *e-budgeting* didefinisikan sebagai alat yang menunjang personel pemerintah untuk mengakses dan memasukkan data penganggaran melalui internet. Pelayanan pemerintah daerah dalam penggunaan *e-budgeting* memiliki potensi untuk perubahan dalam persepsi publik tentang anggaran. Penggunaan *e-budgeting* menyediakan tampilan informasi yang berbeda dan meningkatkan pelayanan melalui informasi serta memberikan peran yang lebih luas kepada warga dalam mengakses informasi terkait penganggaran daerah melalui koneksi internet.

Pemaparan mengenai *e-budgeting* juga dijelaskan oleh Shim, et al. (2011) dalam Rosalina (2016) yang menjelaskan bahwa *e-budgeting* adalah penganggaran berbasis internet atau intranet yang dapat mempersingkat waktu dan mempercepat proses penganggaran dalam organisasi. Manfaat penggunaan *e-budgeting* adalah setiap personel dari semua level dapat mengajukan rencana anggaran dan dapat mengakses kembali informasi yang telah tersedia melalui internet.

Software e-budgeting tersedia di web sehingga informasi anggaran secara elektronik dapat di akses dari mana saja. Hal ini tentu akan memudahkan pengguna dan pengelola anggaran dalam mengakses *e-budgeting*. Manajer organisasi yang telah menggunakan *e-budgeting* menemukan bahwa penggunaannya dapat sangat mempersingkat seluruh proses penganggaran (Rosalina, 2016).

2.5 Pengertian *E-Village Budgeting*

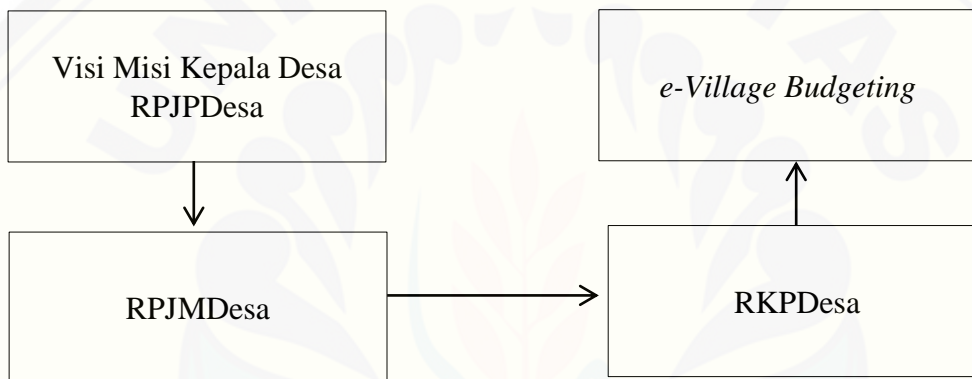
Menurut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 *Elektronic Village Budgeting* yang selanjutnya disebut eVB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

E-Village Budgeting merupakan sistem keuangan desa seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah seperti di kabupaten/kota, tapi berlaku untuk skala

desa dan terhubung langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab). (<http://www.jpnn.com> diakses pada tanggal 27 Oktober 2016)

E-Village Budgeting menjadi alat transparansi penganggaran dan *monitoring* pembangunan di pelosok desa. Dengan sistem ini keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten dapat disinergikan sehingga tercipta keselarasan. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di desa.

Alur Penyusunan *e-Village Budgeting*



Gambar 2.1

Dari gambar 2.1 dapat diketahui alur penyusunan *e-Village Budgeting* dimulai dari penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) kemudian disesuaikan dengan visi dan misi kepala desa yang tertuang dalam RPJPDDes (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa). RPJMDes yang telah disinergikan dengan Kabupaten kemudian dibuat RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) dan kemudian masuk dalam sistem *e-Village Budgeting* untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2.6 Pengendalian Internal

2.6.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) yang diterjemahkan oleh La Midzan dan Azhar Susanto (2001) dapat diuraikan beberapa konsep dasar pengendalian internal:

1. Pengendalian internal adalah suatu proses. Pengendalian internal berupa serangkaian tindakan yang mempengaruhi dan menyatu dengan infrastruktur suatu organisasi.
2. Pengendalian internal berfungsi efektif karena manusia. Pengendalian internal bukan semata-mata kebijakan bersifat manual dan melibatkan berbagai macam formulir tetapi melibatkan orang-orang yang ada di dalam organisasi termasuk dewan direksi, manajemen dan personnel yang lainnya.
3. Pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak tetapi memberikan jaminan yang memadai karena kelemahan inheren yang ada dalam setiap pengendalian intern. Sebagus apapun pengendalian intern diciptakan, pasti memiliki kelemahan.
4. Pengendalian intern diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasional.

2.6.2 Unsur-unsur dari Pengendalian Internal

Moeller (2004:123) menyebutkan *The COSO Internal Control Framework* yang terdiri dari lima komponen pengendalian internal. Komponen tersebut antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. *COSO* menekankan bahwa dalam setiap organisasi, lingkungan pengendalian ini memiliki pengaruh yang luas mengenai bagaimana kegiatan organisasi terstruktur dan risiko dinilai. Lingkungan pengendalian ini mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan

oleh dewan direksi, manajemen, dan yang lainnya mengenai pentingnya pengendalian internal dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian di antaranya integritas dan nilai etika, struktur organisasi, pembagian otoritas dan tanggungjawab serta kebijakan sumberdaya manusia dan prosedurnya.

2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Sebagai bagian dari keseluruhan struktur pengendalian, sebuah organisasi harus memiliki proses untuk mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Penilaian risiko dapat mencakup beberapa tujuan, salah satunya adalah penilaian risiko dalam penyusunan anggaran yang harus sesuai dengan tujuan dan rencana strategis organisasi. Proses penilaian risiko menurut *COSO* adalah sebagai berikut:

- a. Memperkirakan risiko yang signifikan.
- b. Menilai kemungkinan terbesar frekuensi terjadinya peristiwa risiko.
- c. Mempertimbangkan bagaimana risiko harus dikelola dan menilai tindakan apa yang harus dilakukan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan program atau kegiatan yang di buat oleh manajemen/organisasi. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk megurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan aset serta catatan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja. Prosedur pengendalian di tetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Communication and Information*)

Berbagai jenis informasi dan komunikasi dibutuhkan di semua tingkat organisasi untuk mencapai tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan. *COSO* menunjukkan bahwa organisasi yang efektif perlu menerapkan sistem informasi strategis dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan atau operasional organisasi dan membantu untuk melaksanakan misi nya secara keseluruhan. Selain itu, saluran komunikasi yang efektif juga diperlukan dalam menunjang efektivitas organisasi. Saluran komunikasi memberikan rincian kepada individu untuk melaksanakan tanggung jawab operasional, pelaporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal yang dapat dilakukan sepanjang waktu (Bastian, 2007:13). Pemantauan kegiatan pengendalian secara periodik harus dilaksanakan oleh manajemen. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan perlunya pengendalian dimodifikasi atau diperbarui.

2.7 Kinerja Apratur Desa

2.7.1 Konsep Desa dan Aparat Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupannya.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

2.7.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah daerah dapat diartikan sebagai hasil atau pencapaian dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (Soleh, 2011:3). Kinerja dimaknai juga sebagai prestasi kerja yang dicapai instansi dalam periode tertentu. Prestasi kerja tersebut berkaitan dengan efektivitas operasional organisasi baik berkenaan dengan aspek manajerial maupun ekonomis operasional. Melalui informasi kinerja, pemerintah daerah dapat mengetahui secara jujur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

Keberhasilan suatu organisasi sektor publik terutama pemerintahan, tidak dapat diukur semata mata dari perspektif keuangan saja. Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya memiliki sifat dasar *non-profit oriented* yang mengimplikasikan keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan tidak dapat diukur hanya dari surplus atau defisit dari laporan keuangan yang disajikan, tetapi juga harus di ukur dari segi

kinerjanya (Nordiawan, 2010:157). Sistem pengukuran kinerja yang handal dalam pemerintahan merupakan faktor kunci suksesnya organisasi (Mardiasmo,2009:121). Adanya pengukuran kinerja pemerintah membuat instansi harus berfokus pada tujuan dan sasaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Pengukuran kinerja dimulai dengan menetapkan indikator kinerja yang memungkinkan penilaian kinerja personel dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat (Nordiawan, 2010:158). Indikator kinerja itulah yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menilai pencapaian dari kebijakan, kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.

2.7.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2009:122) menjelaskan bahwa secara umum pengukuran kinerja memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik;
2. untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi;
3. untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *good congruence*; dan
4. sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.7.4 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (Mahmudi, 2007:147). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau pedoman bagi manajer dan pihak luar untuk menilai organisasi. Indikator kinerja dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi pihak internal dapat digunakan sebagai bahan evaluasi berbagai kegiatan pemenuhan

akuntabilitas manajerial sedangkan bagi pihak eksternal dapat digunakan sebagai pemantauan kinerja sektor publik.

Indikator kinerja juga digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berbentuk dua hal yaitu faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci (Mardiasmo, 2009:124). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci untuk melaksanakan pencapaian tertentu.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Topik	Variabel	Hasil
1	Penggunaan informasi teknologi dalam penganggaran mendukung peningkatan kinerja (Winata and Lokman, 2011)	1.Penggunaan informasi; 2.partisipasi anggaran.	Hasil penelitian menunjukkan kinerja manajemen di hotel berhubungan positif dengan penggunaan informasi dan teknologi dalam partisipasi anggaran organisasi.
2	Pengendalian internal sebagai variabel yang memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi organisasi terhadap kinerja manajerial (Nugraha dan Tarjono, 2015)	1.Pengendalian internal; 2.partisipasi penyusunan anggaran; 3.desentralisasi organisasi; 4. kinerja manajerial.	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi organisasi terhadap kinerja pemerintah.

3	Pengendalian internal sebagai variabel yang memoderasi penerapan penyusunan anggaran secara elektronik menggunakan <i>e-budgeting</i> terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kota Surabaya (Rosalina, 2016)	1. <i>E-Budgeting</i> ; 2.kinerja; 3.pengendalian internal.	Implementasi <i>e-budgeting</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. Namun Pengendalian internal tidak memoderasi hubungan implementasi <i>e-budgeting</i> terhadap kinerja instansi.
---	--	---	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada ruang lingkup sistem anggaran penelitian yakni penelitian sebelumnya *e-Budgeting* yang berfokus pada kinerja satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem anggaran *e-Village Budgeting* pada kinerja aparatur desa. Perbedaan yang berikutnya yakni pada *monitoring e-Budgeting* dilakukan langsung oleh walikota namun *monitoring e-Village Budgeting* dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) lalu selanjutnya dilakukan oleh bupati masing-masing kabupaten.

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi

Penganggaran yang telah disusun salah satunya berfungsi sebagai alat perencanaan dan penilaian kinerja. Dalam hal ini anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Penyusunan anggaran secara elektronik dilakukan melalui sistem *e-budgeting*. Penggunaan *e-budgeting* dalam proses penganggaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas alur kerja administrasi (Wirtz, et al., 2015). Efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran akan menunjang kinerja personel pemerintah. Adanya efisiensi dan efektivitas tersebut akan meningkatkan pencapaian atau hasil dari penyusunan anggaran.

Secara logis penggunaan *e-Village Budgeting* akan mempengaruhi kinerja aparatur desa. Sistem *e-Village Budgeting* akan memudahkan aparatur desa untuk meningkatkan kualitas dalam kaitannya dengan anggaran desa. Namun keberhasilan penggunaan *e-Village Budgeting* tergantung dari bagaimana *e-Village Budgeting* itu dijalankan, kemudahan *e-Village Budgeting* itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan *e-Village Budgeting* yang digunakan (Rosalina, 2016). Dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Village Budgeting* di desa dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna dan pada akhirnya berdampak positif dalam meningkatkan kinerja aparatur desa, dimana aparatur desa mencapai serangkaian tugas kerja yang efektif sehingga meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, integritas dan keakuratan informasi yang dihasilkan dengan menggunakan penerapan *e-Village Budgeting* yang sesuai dengan kebutuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mirchandani (2008) menyebutkan bahwa penganggaran secara online (*e-budgeting*) memiliki hubungan yang positif dengan efisiensi penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran yang efisien akan mempengaruhi kinerja instansi dalam pelaksanaannya. Selain itu Melitsky (2003) juga menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan seperti *e-government* dapat meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Mirchandani, et al. (2008) penganggaran online (*e-budgeting*) merupakan bagian dari *e-government*. Dengan demikian, implementasi *e-budgeting* dapat mengacu pada penggunaan *e-government*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh antara penggunaan *e-Village Budgeting* (eVB) terhadap kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi.

H₁: Penggunaan *E-Village Budgeting* Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi.

2.9.2 Pengaruh Penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi

Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai proses atau kegiatan pengawasan yang dilakukan pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah penganggaran berbasis elektronik (*e-budgeting*). Pengendalian internal dibutuhkan untuk menunjang penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran agar proses penganggaran berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal dan tolak ukur pengujian efektivitas sistem pengendalian internal, maka dibutuhkan pengembangan unsur sistem pengendalian internal (Adiningrum, 2014). Pengembangan tersebut perlu mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi informasi yang dilakukan secara komprehensif. Pengembangan teknologi ini dapat berupa penggunaan sistem *e-budgeting* dalam rangka penyusunan anggaran.

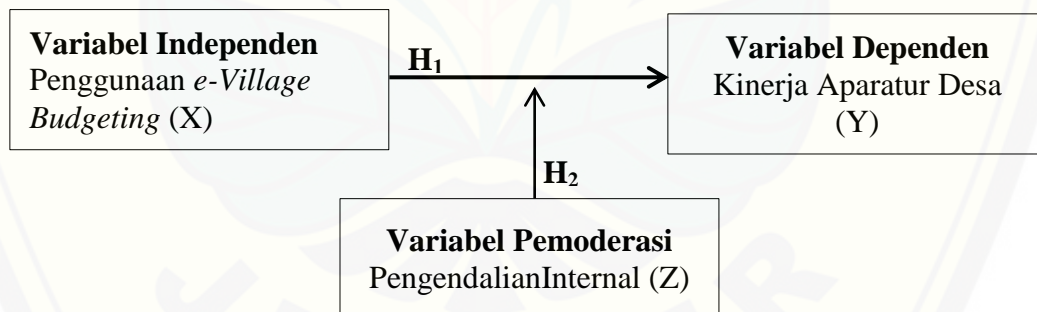
Secara logis salah satu unsur pengendalian internal adalah aktivitas peninjauan kinerja dalam rangka pengawasan kegiatan atau program. Dengan adanya pengendalian internal diharapkan kinerja organisasi akan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan hasil dari kegiatan atau program yang dilaksanakan. Uraian di atas menjelaskan bahwa pengendalian internal dapat membantu proses terlaksananya penerapan teknologi dengan memadai dan membantu dalam proses peningkatan kinerja melalui aktivitas pengendalian (Rosalina, 2016). Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal mempengaruhi penerapan *e-Village Budgeting* di desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja aparatur desa.

Hal tersebut didukung dengan penelitian dari Ernawilis (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian internal dapat memoderasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Pengendalian internal dapat membantu mengawasi proses dalam penerapan teknologi agar tujuan penerapannya dapat tercapai sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji peran moderasi pengendalian internal yang mempengaruhi hubungan penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap kinerja aparatur desa.

H₂: Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan antara Penggunaan *e-Village Budgeting* dengan Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi.

2.10 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian hipotesis di atas, maka diperoleh model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014:130). Desain penelitian harus sesuai dengan metode yang dipilih. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013:2).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: individu, organisasional, industri atau perspektif orang lain (Indriantoro dan Supomo, 2014:88).

Desain penelitian ini adalah survei. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden (Sugiyono, 2012:308). Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: metode survey dan metode observasi. Unit analisis penelitian ini yaitu pengguna *e-Village Budgeting* di Kabupaten Banyuwangi. Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket).

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan diseluruh desa di Kabupaten Banyuwangi. Waktu yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah satu bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:115) populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel yaitu sebagian dari elemen-elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwang sebanyak 189 Desa. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu, *random sampling*. *Random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dimana individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Semakin besar sampel mendekati populasi maka peluang kesalahan generalisasi makin kecil, begitu pula sebaliknya (Indriantoro dan Supomo, 2014:120). Penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* maka *sampling* diambil secara acak, sampel penelitian ini mengacu pada jumlah kecamatan sebanyak 24 kecamatan sehingga sampel dalam penelitian yakni 2 desa pada setiap kecamatan sebanyak 48 desa.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian/responden (Indriantoro dan Supomo, 2014:146).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari anggota dewan atau data yang terjadi di lapangan penelitian, dan kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2014:145).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa angket/kuesioner pengembangan dari kuesioner penelitian Rosalina (2016). Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu:

1. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. (Indriantoro dan Supomo, 2014:152).
2. Kuesioner, teknik kuesioner memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Teknik kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden (Indriantoro dan Supomo, 2014:154). Responden dalam penelitian ini adalah bendahara desa.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:63), tipe-tipe variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi variabel dalam hubungan antar variabel, yaitu: Variabel Independen, Variabel dependen dan Variabel Pemoderasi.

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Aparatur Desa Kabupaten Banyuwangi (Y).

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel bebas (independen) yaitu Penggunaan *e-Village Budgeting* (X).

3. Variabel Pemoderasi

Variabel pemoderasi yaitu variabel yang mempengaruhi (menguatkan atau melemahkan) hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel pemoderasi yaitu Pengendalian Internal (Z).

3.6.2 Definisi Operasional Variabel

Indriantoro dan Supomo (2014:61) menjelaskan yang disebut variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan mediator antara *construct* yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut:

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju
2. Skor 4 untuk kategori setuju
3. Skor 3 untuk kategori netral
4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju
5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggunaan *e-Village Budgeting*

Penggunaan *e-Village Budgeting* merupakan penerapan penyusunan anggaran pemerintah daerah secara elektronik berbasis internet guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan.

Variabel penggunaan *e-Village Budgeting* diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Rosalina (2016). Instrumen tersebut berisi sepuluh

butir pertanyaan yang mengukur implementasi *e-budgeting* dengan indikator yaitu: kemampuan pengguna, efisiensi dan efektifitas alur kerja administrasi, mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi, menyederhanakan alur birokrasi, mempermudah hubungan komunikasi antar pengguna, peningkatan proses pengambilan keputusan, kelengkapan informasi dan fitur, komponen penyusun anggaran tersedia secara online, kontrol yang lebih besar, dan kerahasiaan data. Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

2. Kinerja Aparatur Desa

Kinerja aparatur desa merupakan hasil atau pencapaian dalam perencanaan suatu kegiatan atau program penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Variabel kinerja aparatur desa diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Rosalina (2016). Instrumen tersebut berisi sepuluh butir pertanyaan yang mengukur kinerja aparatur desa dengan indikator yaitu: hasil kerja dalam pelaksanaan program, efisiensi biaya dan waktu, input yang dibutuhkan dalam program diperoleh dengan harga yang wajar dan kualitas memadai, relevansi dan efektifitas, koordinasi yang baik, dan pengawasan. Untuk pengukuran variabel, peneliti menggunakan skala likert 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

3. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan proses atau kegiatan pengawasan yang dilakukan organisasi dan seluruh pegawai pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Variabel pengendalian internal diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Rosalina (2016). Instrumen tersebut berisi sepuluh butir pertanyaan yang mengukur pengendalian internal dengan indikator yaitu: penetapan tujuan, penetapan standar kinerja, pemantauan (*monitoring*), evaluasi, reviu kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian pengelolaan sistem informasi, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan akurat dan tepat waktu, dan pembatasan akses sumber daya. Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

3.7 Analisis Data

Menurut Siregar (2013:85) pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Indriantoro dan Supomo (2014:170) menyebutkan, statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (standar deviasi dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan alat statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden, seperti jenis kelamin, pendidikan, jabatan, lama bekerja dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.

3.7.2 Uji Instrumen

Kesimpulan penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: validitas dan reliabilitas. Artinya, suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang *reliable* dan kurang *valid*.

A. Uji Validitas

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2013:46). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS *ver.22 for windows* dengan uji *coefficient correlation pearson*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor konstruk memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir tersebut dinyatakan valid (Sunyoto, 2011:73-75).

B. Uji Reliabilitas

Siregar (2013:55) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsistensi atau stabil

dari waktu ke waktu. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *One shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran butir pertanyaan dengan sekali menyebar kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS, dengan fasilitas *Cornbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cornbach Alpha* $> 0,60$.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Priyatno, 2010:71). Pengujian normalitas data dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi > 0.05 maka data tersebut berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua variabel independen dalam fungsi linear dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan dependen variabel. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas atau korelasi tinggi antarvariabel independen dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013:25).

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model terdapat varian yang tidak sama dalam semua pengamatan. Penelitian ini menggunakan uji Glejser (*Glejser Test*) dalam menguji ada tidaknya heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai residual dan nilai absolut terhadap seluruh variabel bebas, jika nilai signifikan $> 5\%$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 2003:93).

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Indriantoro dan Supomo (2014:202) menjelaskan penggunaan metode statistik untuk penelitian terhadap satu variabel penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dapat ditentukan berdasarkan tujuan studi (masalah atau pertanyaan penelitian) dan skala pengukuran variabel yang bersangkutan. Uji hipotesis terhadap satu variabel umumnya berupa uji perbedaan nilai sampel dengan populasi atau nilai dari data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis).

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan alat analisa regresi dengan menggunakan program SPSS *ver.22 for windows*. Alat analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dimana koefisien regresi ini bertujuan untuk meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel

dependen berdasarkan data yang ada (Ghozali, 2013). Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

a. Pengujian Hipotesis 1 Menggunakan Analisis Regresi Sederhana

$$Y = \alpha + \beta_1 X + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kinerja Instansi Pemerintah Aparatur Desa
 α = Konstanta
 β_1 = Koefisien Regresi
X = Penggunaan *e-Village Budgeting*
e = *error*

b. Pengujian Hipotesis 2 Menggunakan *Modarated Regression Analysis (MRA)*

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 XZ + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y = Kinerja Instansi Pemerintah Aparatur Desa
 α = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
X = Penggunaan *e-Village Budgeting*
Z = Pengendalian Internal
XZ = Interaksi Penggunaan *e-Village Budgeting* dengan Pengendalian Internal
e = *error*

Adapun dari hipotesis yang diterima apabila angka signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak, dan jika angka > 0.05 maka H_0 diterima.

A. Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi liner. Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau belum dengan ketentuan bahwa jika p value $< (\alpha) = 0,05$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tingkat kepercayaan 95% (Ghozali, 2013:84).

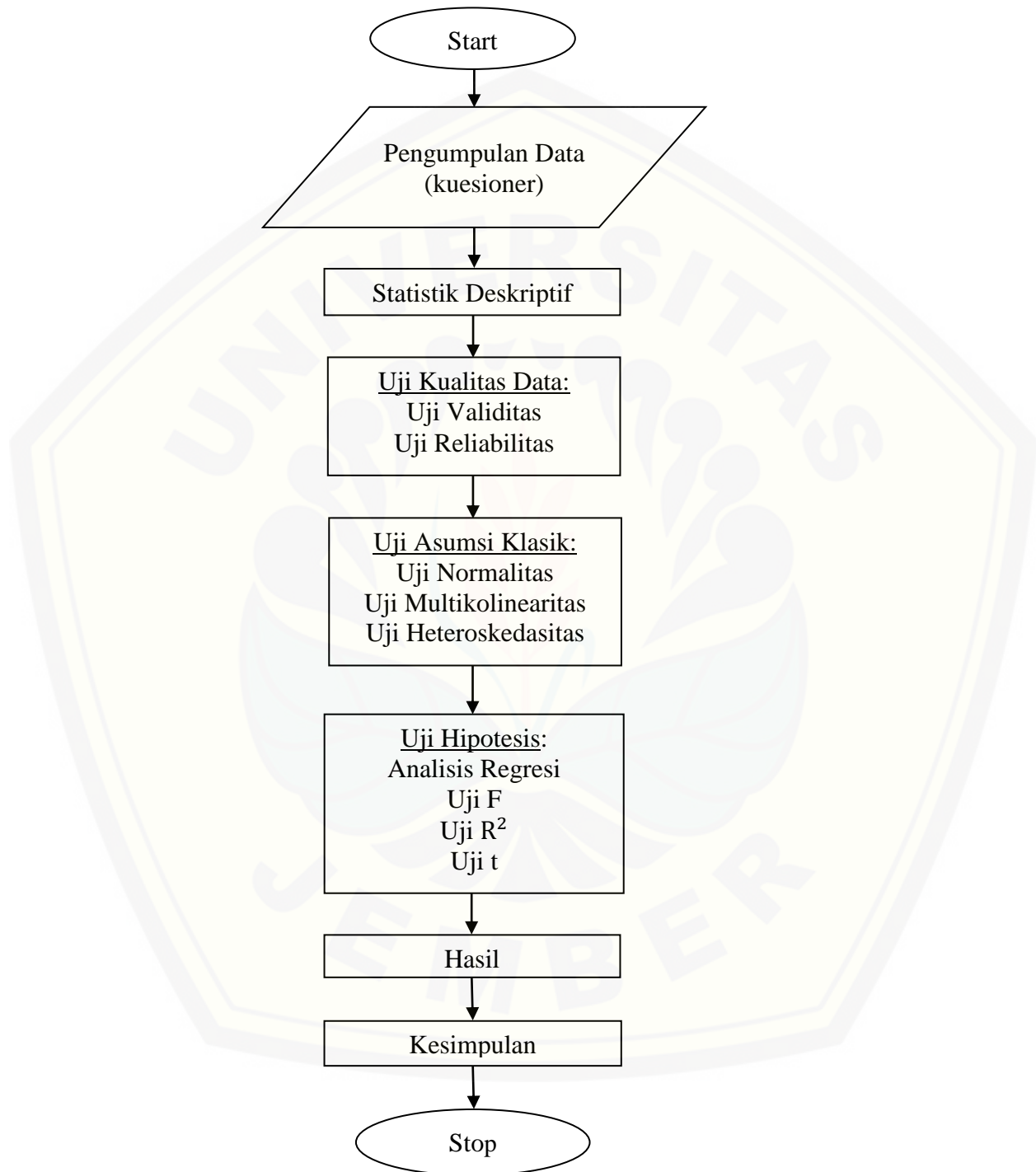
B. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu (Ghozali, 2013: 169).

C. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi thitung dengan ketentuan: jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 ditolak dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 diterima (Ghozali, 2013:84).

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian Hipotesis 1 menggunakan regresi sederhana atas penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap kinerja aparatur desamenunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan Penggunaan *e-Village Budgeting* yang baik mampu meningkatkan kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi. Hasil pengujian Hipotesis 2 menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa interaksi antara penggunaan *e-Village Budgeting* dengan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur desa. Ini membuktikan bahwa pengendalian internal dalam penggunaan *e-Village Budgeting* sudah baik sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur desa di Kabupaten Banyuwangi.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah:

1. Pengisi kuesioner hanya kepala urusan keuangan (bendahara) desa saja.
2. Lokasi desa berjauhan sehingga tidak semua desa datanya dapat dikonfirmasi.
3. Tidak diadakannya *pilot study* untuk menguji kuesioner.
4. Pengambilan sampel secara acak mungkin tidak dapat menggambarkan karakteristik desa pengguna *e-Village Budgeting* yang sebenarnya sehingga data dari penelitian ini kurang representatif.

5.3 Saran

1. Penelitian berikutnya dapat menambah variabel independen lainnya agar mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja aparatur desa. Selain itu penelitian selanjutnya dapat mencari variabel lain yang mungkin dapat memperkuat atau mempengaruhi secara tidak langsung hubungan antara penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap kinerja aparatur desa.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara lebih mendalam mengenai sistem *e-Village Budgeting*.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode *purposive* ataupun *cluster sampling* dengan menggunakan desa yang berlokasi di kota dengan desa yang berlokasi di pinggiran untuk melihat keakuratan data kuesioner dan keefektifan penggunaan *e-Village Budgeting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrum, Trisna. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Good Governance sebagai Intervening (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Bastian, Indra 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ernawilis. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi Kab. Kuantan Singingi*. Skripsi. Riau: Universitas Riau.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., A. Hodgson, S. Holms, dan A. Tarca. 2010. *Accounting Theory 7th Edition*. Australia: John Wiley & Sons Australia. Ltd.
- Gujarati, Damodar (2003). *Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.jpnn.com> diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Persada.
- Midjan, La dan Susanto, Azhar. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi Penjualan*. Bandung: Lingga Jaya.

- Moeller, Robert R. 2004. *New Internal Auditing Rules*. Jhon Willey and Sons Inc. Hoboken – New Jersey.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Biaya, Edisi Kelima*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nordiawan, Dedi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Dedi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Jakarta*: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 *tentang Elektronik Village Budgeting*.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Rosalina, Verina W. 2016. *Implementasi E-Budgeting Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sagay, Brian. 2013. *Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sari, Irmala. 2010. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik*. Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
- Shim, Jae K. and Siegel, Joel G. 2011. *Budgeting Basics and Beyond Fourth Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika Edisi Ke Enam*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Dadang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah.*

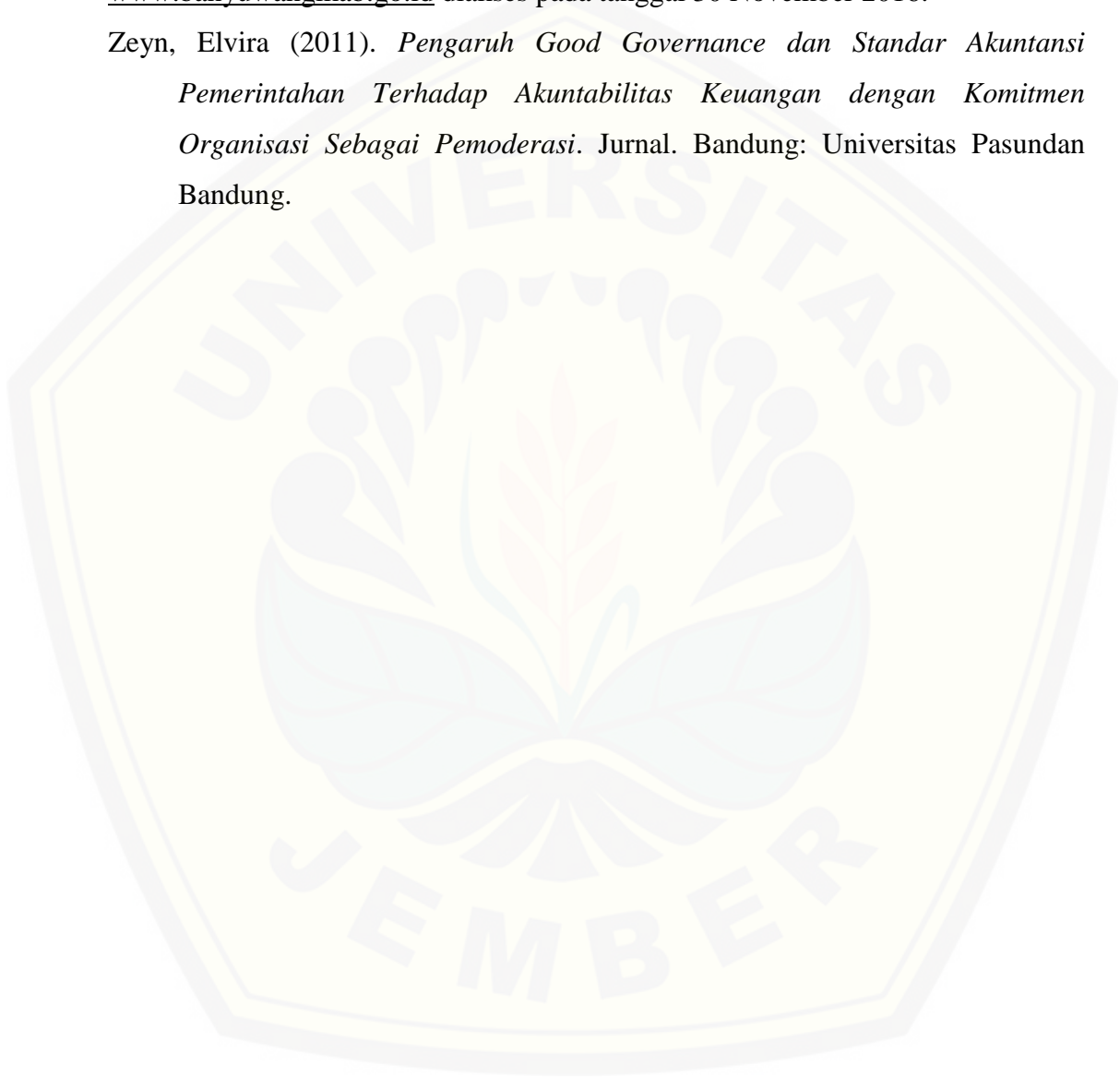
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa.*

www.banyuwangikab.go.id diakses pada tanggal 10 September 2016.

www.banyuwangikab.go.id diakses pada tanggal 30 November 2016.

Zeyn, Elvira (2011). *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi.* Jurnal. Bandung: Universitas Pasundan Bandung.



Lampiran 1
Kuesioner Penelitian

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan bantuan pengisian kuesioner penelitian

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Tugas Akhir Program Studi Akuntansi S-1 Universitas Jember, saya bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penggunaan *e-Village Budgeting* terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi”**. Penelitian ini membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu sebagai sampel penelitian dengan menjadi responden dalam penelitian ini.

Penyebaran kuesioner ini mungkin akan mengganggu aktivitas bapak/ibu. Namun demikian dengan kerendahan hati, saya memohon Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Partisipasi bapak/ibu sangat penting dalam penelitian ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu dijamin dan jawaban tersebut hanya digunakan untuk keperluan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, penulis mengucapkan terimakasih.

Hormat Penulis,

Dwi Ayu Septiyani

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
2. Pendidikan Terakhir : a. SMA/MA b. D-3 c. S-1 d. S-2 e. S-3
3. Jabatan :
4. Lama Bekerja : a. 1-3 tahun b. 3-5 tahun c. > 5 tahun

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai.
2. Keterangan Jawaban :
 - a. STS : Sangat Tidak Setuju (1)
 - b. TS : Tidak Setuju (2)
 - c. N : Netral (3)
 - d. S : Setuju (4)
 - e. SS : Sangat Setuju (5)

A. Penggunaan *e-Village Budgeting* (X)

No	Daftar Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya menggunakan <i>e-Village Budgeting</i> (eVB) dalam proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)					
2	Menurut saya, eVB mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes					
3	Menurut saya, penggunaan eVB mampu menyederhanakan alur birokrasi dan mempercepat penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes					
4	Menurut saya, dengan adanya eVB terdapat efisiensi biaya dalam proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes					
5	Menurut saya, dengan penggunaan sistem eVB maka mempermudah hubungan (komunikasi) dengan antar pengguna untuk bekerja sama dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes					
6	Menurut saya, sistem eVB memberikan fitur yang lengkap untuk proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes					
7	Menurut saya, seluruh komponen yang digunakan untuk menyusun APBDes dapat diakses secara online					

8	Menurut saya, pemerintah desa memberikan kontrol yang memadai dalam proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes					
9	Menurut saya, dengan adanya eVB, data terjaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk tujuan lain, selain kegiatan yang ada dalam APBDes					
10	Saya mampu dalam penggunaan eVB sebagai alat penyelenggaraan pemerintah desa					



B. Kinerja Aparatur Desa (Y)

No	Daftar Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Adanya penerapan <i>e-Village Budgeting</i> (eVB) mendorong penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang lebih maksimal					
2	Penerapan eVB mendorong penghematan biaya					
3	Adanya penghematan waktu dalam penyusunan APBDes melalui pelaksanaan eVB					
4	Melalui eVB harga barang dan jasa diperoleh dengan harga yang wajar sesuai pasar dengan kualitas yang memadai					
5	Program kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tujuan pemerintah desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDes)					
6	Pemerintah desa memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam pelaksanaan eVB					
7	Pemerintah desa melakukan pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat terkait APBDes					
8	Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam RPJMDes					
9	Terdapat pengendalian untuk pengeluaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan					
10	Terdapat pengendalian untuk mencegah penggunaan APBDes yang tidak semestinya					

C. Pengendalian Internal (Z)

No	Daftar Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintah desa menetapkan tujuannya (APBDes) secara jelas sesuai visi dan misi kepala desa					
2	Pemerintah desa memiliki standar kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas					
3	Pemerintah desa melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan/kebijakan/program					
4	Pemerintah desa melakukan pemantauan (<i>monitoring</i>) atas kinerja secara berkelanjutan					
5	Pemerintah desa melakukan pembinaan terhadap aparatur desa					
6	Pemerintah desa melakukan pengendalian atas pengelolaan eVB					
7	Pemerintah desa memisahkan tugas sesuai fungsi masing-masing aparatur desa					
8	Pemerintah desa melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting					
9	Pemerintah desa memiliki pencatatan yang akurat dan tepat waktu					
10	Pemerintah desa memberikan batasan dalam akses sistem eVB dan pencatatan transaksi keuangan desa					

Lampiran 3
Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	L	27	64.3	64.3	64.3
	P	15	35.7	35.7	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	SMA/MA	11	26.2	26.2	26.2
	D3	6	14.3	14.3	40.5
	S1	25	59.5	59.5	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Jabatan

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Bendahara	42	100.0	100.0	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Lama Bekerja

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	1-3tahun	2	4.8	4.8	4.8
	3-5tahun	16	38.1	38.1	42.9
	>5tahun	24	57.1	57.1	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Lampiran 4
Jawaban Responden

Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
X.1	42	2.00	5.00	3.7857	.56464
X.2	42	3.00	5.00	3.8810	.39524
X.3	42	3.00	5.00	3.8571	.47223
X.4	42	2.00	5.00	3.5714	.66783
X.5	42	3.00	5.00	3.8095	.50549
X.6	42	2.00	5.00	3.3810	.69677
X.7	42	2.00	5.00	3.3095	.71527
X.8	42	2.00	5.00	3.5714	.66783
X.9	42	3.00	5.00	3.5238	.67130
X.10	42	2.00	5.00	3.5952	.91223
Y.1	42	3.00	4.00	3.8571	.35417
Y.2	42	2.00	5.00	3.3810	.69677
Y.3	42	3.00	4.00	3.9524	.21554
Y.4	42	2.00	4.00	3.3333	.57027
Y.5	42	3.00	4.00	3.8571	.35417
Y.6	42	2.00	4.00	3.1429	.56618
Y.7	42	2.00	4.00	3.0476	.49151
Y.8	42	2.00	4.00	3.3810	.58236
Y.9	42	3.00	4.00	3.2619	.44500
Y.10	42	2.00	5.00	3.5238	.91700
Z.1	42	3.00	4.00	3.8571	.35417

Z.2	42	2.00	5.00	3.3810	.69677
Z.3	42	3.00	4.00	3.9524	.21554
Z.4	42	2.00	4.00	3.3333	.57027
Z.5	42	3.00	5.00	3.8810	.39524
Z.6	42	2.00	5.00	3.4048	.62701
Z.7	42	2.00	5.00	3.3571	.61768
Z.8	42	2.00	5.00	3.5714	.66783
Z.9	42	2.00	5.00	3.6429	.82111
Z.10	42	2.00	5.00	3.4762	1.04153
<i>Valid N (listwise)</i>	42				

Y.4	Pearson Correlation	.000	.102	.132	1	.242	.453**	.290	.049	-.064	-.155	.418**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.519	.404		.123	.003	.062	.758	.687	.326	.006
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Y.5	Pearson Correlation	.222	.226	-.091	.242	1	.591**	.600**	.270	.243	-.064	.616**
	Sig. (2-tailed)	.157	.150	.565	.123		.000	.000	.083	.121	.685	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Y.6	Pearson Correlation	.348*	.415**	.057	.453**	.591**	1	.676**	.275	.332*	.040	.820**
	Sig. (2-tailed)	.024	.006	.719	.003	.000		.000	.078	.032	.800	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Y.7	Pearson Correlation	.320*	.373*	.022	.290	.600**	.676**	1	.617**	.276	.160	.888**
	Sig. (2-tailed)	.039	.015	.890	.062	.000	.000		.000	.077	.312	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Y.8	Pearson Correlation	.270	.114	.148	.049	.270	.275	.617**	1	.453**	-.200	.582**
	Sig. (2-tailed)	.083	.470	.349	.758	.083	.078	.000		.003	.204	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Y.9	Pearson Correlation	.243	-.015	.133	-.064	.243	.332*	.276	.453**	1	-.344*	.391*
	Sig. (2-tailed)	.121	.925	.400	.687	.121	.032	.077	.003		.026	.010
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Y.10	Pearson Correlation	-.215	.329*	-.118	-.155	-.064	.040	.160	-.200	-.344*	1	.469*
	Sig. (2-tailed)	.172	.033	.459	.326	.685	.800	.312	.204	.026		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Y	Pearson Correlation	.372*	.378*	.469*	.418**	.616**	.820**	.888**	.582**	.391*	.469*	1
	Sig. (2-tailed)	.015	.014	.000	.006	.000	.000	.000	.000	.010	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Z.9	Pearson	.240	.372*	.177	.313*	.016	-.091	.210	.426**	1	.489**	.633**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.126	.015	.262	.044	.919	.565	.183	.005		.001	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Z.10	Pearson	.387*	.114	-	.219	-.274	-.340*	-.005	.336*	.489**	1	.356*
	Correlation			.114								
	Sig. (2-tailed)	.011	.474	.473	.163	.079	.028	.973	.030	.001		.021
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Z	Pearson	.396**	.352*	.469*	.340*	.387**	.450**	.544**	.425**	.633**	.356*	1
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.009	.022	.000	.028	.015	.003	.000	.005	.000	.021	
	N	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R _{tabel}	R _{hitung}	Sig	Ket
Penggunaan <i>e-Village Budgeting</i> (X)	X.1	0,304	0,621	0,000	Valid
	X.2	0,304	0,463	0,002	Valid
	X.3	0,304	0,589	0,000	Valid
	X.4	0,304	0,640	0,000	Valid
	X.5	0,304	0,677	0,000	Valid
	X.6	0,304	0,731	0,000	Valid
	X.7	0,304	0,851	0,000	Valid
	X.8	0,304	0,571	0,000	Valid
	X.9	0,304	0,603	0,000	Valid
	X.10	0,304	0,469	0,001	Valid
Kinerja Aparatur Desa (Y)	Y.1	0,304	0,372	0,015	Valid
	Y.2	0,304	0,378	0,014	Valid
	Y.3	0,304	0,469	0,000	Valid
	Y.4	0,304	0,418	0,006	Valid
	Y.5	0,304	0,616	0,000	Valid
	Y.6	0,304	0,820	0,000	Valid
	Y.7	0,304	0,888	0,000	Valid
	Y.8	0,304	0,582	0,000	Valid

	Y.9	0,304	0,391	0,010	Valid
	Y.10	0,304	0,469	0,000	Valid
Pengendalian Internal (Z)	Z.1	0,304	0,396	0,009	Valid
	Z.2	0,304	0,352	0,022	Valid
	Z.3	0,304	0,469	0,000	Valid
	Z.4	0,304	0,340	0,028	Valid
	Z.5	0,304	0,387	0,015	Valid
	Z.6	0,304	0,450	0,003	Valid
	Z.7	0,304	0,544	0,000	Valid
	Z.8	0,304	0,425	0,005	Valid
	Z.9	0,304	0,633	0,000	Valid
	Z.10	0,304	0,356	0,021	Valid

B. Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	42	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	42	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.740	11

Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.714	11

Z

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.698	11

Lampiran 6
Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X	Y	Z
<i>N</i>		42	42	42
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	27.1538	18.1346	20.9615
	<i>Std. Deviation</i>	6.14653	3.59209	4.85460
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.099	.217	.195
	<i>Positive</i>	.068	.116	.112
	<i>Negative</i>	-.099	-.217	-.195
<i>Test Statistic</i>		.099	.217	.195
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}	.112 ^c	.200 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

B. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)	24.463	3.175		7.705	.000		
X	.513	.355	.215	3.374	.001	.734	1.363
Z	.435	.147	.446	2.962	.005	.407	1.323
X.Z	.204	.240	.348	8.493	.000	.597	2.339

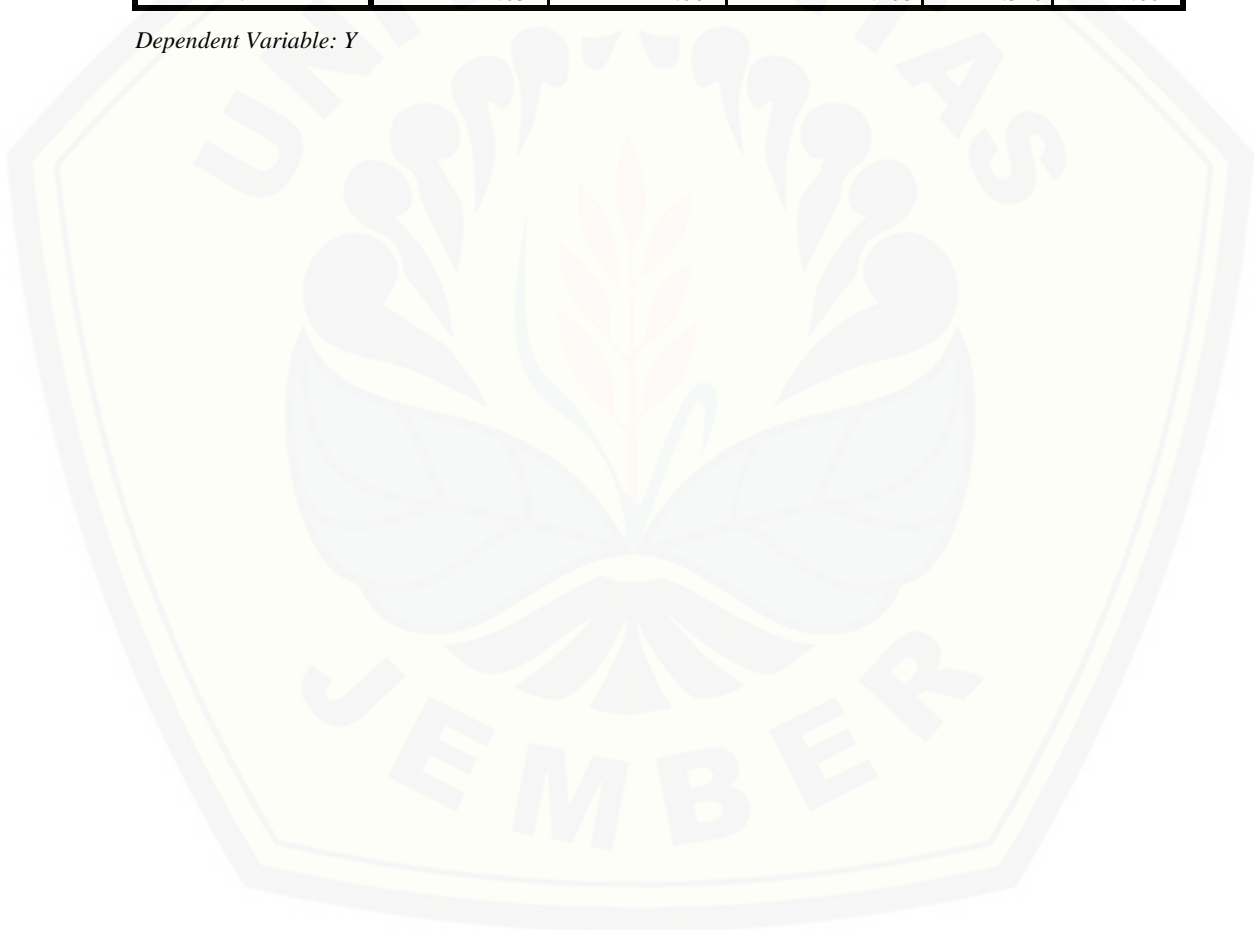
Dependent Variable: Y

C. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	.300	.044		6.838	.000
X	-.173	.076	-.583	-1.281	.227
Z	.128	.078	.415	1.635	.109
X.Z	.032	.061	.108	.526	.602

Dependent Variable: Y



Lampiran 7
Uji Hipotesis - Analisis Regresi Sederhana

X ke Y

A. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.441 ^a	.194	.174	2.04528

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

B. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40.316	1	40.316	9.638	.003 ^b
	Residual	167.327	40	4.183		
	Total	207.643	41			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

C. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.520	3.184		8.014	.000
	X	.271	.087	.441	3.104	.003

Dependent Variable: Y

Lampiran 8
Uji Hipotesis - Moderated Regression Analysis (MRA)

X Z ke Y (Moderasi)

A. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.653 ^a	.607	.522	.71111

a. Predictors: (Constant), X.Z, X, Z

b. Dependent Variable: Y

B. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	188.427	3	62.809	124.208	.000 ^b
	Residual	19.216	38	.506		
	Total	207.643	41			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X.Z, X, Z

C. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.463	3.175		7.705	.000
	X	.513	.355	.215	3.374	.001
	Z	.435	.147	.446	2.962	.005
	X.Z	.204	.240	.348	8.493	.000

Dependent Variable: Y

Lampiran 9
R – tabel

N	<i>The Level of</i>		N	<i>The Level of</i>	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Lampiran 10
t – tabel

P_t \ df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171

Lampiran 11
F – tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97

35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

